



Buletin Parlementaria

Nomor 1080/IV/XI/2019 • November 2019



DPR Dorong KCJB Selesai Juli 2021



3 Ketua DPR Apresiasi
Komitmen Brimob
Jaga NKRI



11 Impor Gula Konsumsi
Harus Dibatasi



9 772614 339005

DPR Dorong KCJB Selesai Juli 2021

Komisi VI DPR RI mendorong pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bisa selesai sesuai target operasi pada Juli 2021 mendatang. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai, Proyek Strategis Nasional KCJB awalnya menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat karena menelan biaya cukup besar sekitar 6 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dan proses pembebasan lahannya sempat tertunda hingga setahun dari targetnya.

Hal itu terungkap saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Deputi BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Direksi PT. KAI, Direksi PT. Wijaya Karya, Direksi PT. Jasa

Marga, Direksi Perkebunan Nusantara VIII, Direksi PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Direksi PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) beserta jajarannya di Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/11).

Dari laporan Direksi PT. KCIC hingga awal November 2019, progres pembangunan proyek kereta dengan jarak tempuh 142,3 km ini sudah mencapai 36,01 persen. "Kita harapkan komitmen Menteri BUMN yang baru dalam melanjutkan proyek ini agar sukses sesuai target. Kami juga berharap megaprojek KCJB dibangun dengan baik dan benar, agar kelak bisa mengembalikan modalnya yang mencapai sekitar Rp 85 triliun dan tidak menjadi beban berat bagi BUMN kita," jelas Hekal.

Posisi pembebasan lahan yang awalnya tersendat hampir setahun lamanya, kini sudah mencapai 99,06 persen. Jadi, jadwal masih ditetapkan sesuai target tahun 2021 KCJB bisa beroperasi. "Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan adalah soal pembebasan lahan. Saat ini, kendala terkait administrasi di pengadilan dan negosiasi besaran ganti rugi itu tersisa kurang dari satu persen," tandas politisi Partai Gerindra ini.

Hekal juga mengingatkan perihal dampak lingkungan dari proyek KCJB agar jangan sampai menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Legislator dapil Jawa Tengah IX ini juga mendorong agar proyek ini tetap menjaga kebersihan perkebunan teh. Direktur Utama PT. KCIC Chandra Dwi Putra dalam paparannya menjelaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung diharapkan akan memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung dari biasanya 3 jam 35 menit menjadi hanya 46 menit. ■ oji/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal memimpin Tim Kunspek Komisi VI meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Foto: Naefuroji/HR



Ketua DPR Apresiasi Komitmen Brimob Jaga NKRI



Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Kapolri Idham Azis menghadiri HUT ke-74 Korps Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Foto: Kresno/HR

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi komitmen Korps Brimob sebagai pasukan elit Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tidak perlu diragukan lagi dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

Puan menyatakan, peranan Resimen ini tercatat dalam tinta emas sejarah Indonesia dalam beberapa operasi penumpasan dan pembersihan berbagai pemberontakan dalam sejarah bangsa Indonesia, mulai dari DI/TII Kartosuwiryo, DI/TII Daud Beureuh, PRRI, sampai operasi penumpasan DI/TII Kahar Muzakkar. Bahkan, Brimob juga terlibat saat pembebasan Irian Barat.

"Karena itu, bagi saya, komitmen Brimob untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila tidak perlu kita ragukan lagi," ujar Puan saat menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Korps Brimob, di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Kamis (14/11).

Untuk itu, Puan bersyukur Indonesia memiliki pasukan Brimob. Menurutnya kelahiran Brimob tidak bisa dilepaskan dari perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. "Embrio Brimob menjadi pasukan pionir dalam awal perebutan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," ungkap politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Di sisi lain, berkaitan dengan penanganan aksi unjuk rasa, Puan berpesan agar para personel Brimob tetap berpegang teguh pada Prosedur Tetap (Protap) pengamanan dan tidak mudah terpancing emosi meski dihujat para pendemo.

"Mereka adalah saudara-saudara kita juga. Ikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) pengamanan dan patuhi garis komando. Jangan lupa aturan-aturan HAM ketika menghadapi unjuk rasa," pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut. ■ pun/es



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Armanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah,
Gerald Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natallio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Komisi I Dorong PT. Len Industri Siapkan Kebutuhan Alutsista TNI

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Utut Adiarto meninjau langsung PT. Len Industri (Persero) untuk memastikan kesiapan PT. Len Industri (Persero) dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI. Selain itu juga untuk mengetahui peralatan alutsista apa saja yang sudah dikembangkan oleh PT. Len Industri.

“Pertemuan kali ini selain membahas rekam jejak PT. Len Industri dalam bisnis pertahanan, juga fokus membahas kesiapan PT. Len Industri dalam pemenuhan kebutuhan peralatan elektronika pertahanan dan peralatan radar untuk TNI,” ujar Utut saat pertemuan dengan Direksi PT. Len Industri (Persero) beserta jajaran di Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/11).

Selain mengapresiasi atas prestasi PT. Len Industri yang merupakan salah satu industri komponen utama dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI, Utut juga mendorong agar PT. Len melakukan pengembangan atas teknologi pertahanan Nasional.

“Ke depannya akan banyak program pemerintah untuk alutsista yang perlu mendapat dukungan dari BUMN yang bergerak di bidang pengembangan alutsista, salah satunya adalah pengembangan sistem radar yang dibuat PT. Len Industri,” harap politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Len Industri (Persero) Zakky Gamal Yasin menyampaikan kesiapannya dalam mendukung kemandirian alutsista TNI, termasuk dengan rencana



Tim Kunspek Komisi I DPR RI meninjau sarana dan prasarana PT. Len Industri (Persero). Foto: Andri/HR

”

KE DEPANNYA AKAN BANYAK PROGRAM PEMERINTAH UNTUK ALUTSISTA YANG PERLU MENDAPAT DUKUNGAN DARI BUMN YANG BERGERAK DI BIDANG PENGEMBANGAN ALUTSISTA

pembangunan dan pengembangan bisnis pertahanan di PT. Len Industri.

“Hingga kini produk pertahanan Len sudah *running well* dan telah diaplikasikan ke berbagai alat pertahanan yang digunakan oleh TNI,” sebutnya. Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungannya terhadap pengembangan industri pertahanan nasional serta terus mengaplikasikan produk unggulan PT. Len Industri dalam sistem pertahanan Republik Indonesia.

Kunjungan kemudian diteruskan dengan peninjauan Ruang *Display* Produk, Ruang Pengembangan Simulator Pesawat, dan terakhir Ruang Fasilitas Produksi Elektronika di PT. Len Industri. ■ man/es

Pemerintah Harus Gunakan Alutsista Dalam Negeri

Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI menilai produksi berbagai senjata ringan yang dipergunakan TNI, Polri dan pihak pertahanan negara lainnya dari PT. Pindad (Persero) sudah cukup baik. Namun, sayangnya keberpihakan pemerintah dalam menggunakan produk dalam negeri masih rendah.

Ketua Tim Kunspek Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) cukup banyak, namun kontrak antar pemerintah dengan PT. Pindad (Persero) belum maksimal. “Kalau kita mendorong kemandirian industri alutsista dalam negeri, maka pemerintah juga harus mendorong dalam menggunakan produk dalam negeri,” ungkapnya usai

memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan Direktur Utama dan jajaran Direksi PT. Pindad (Persero) di Turen, Kabupaten Malang, Provinsi, Jawa Timur, Kamis (14/11).

Dijelaskan Riefky, saat ini pemerintah belum optimal menggunakan produk dalam negeri dari PT. Pindad. Padahal seharusnya produksi anak bangsa harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Yang menjadi sorotan kami adalah produksi dalam memenuhi kebutuhan alutsista sudah cukup tapi pemerintah masih mengambil ke luar negeri. Ini akan kami bahas saat rapat dengan menteri terkait,” jelasnya.

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, Komisi I DPR RI komitmen mendorong keselarasan dan kecermatan dalam pemenuhan kebutuhan alutsista dengan

program modernisasi alutsista pada setiap tahapan *Minimum Essential Forces* (MEF). Dukungan tersebut direalisasikan melalui politik anggaran, Komisi I DPR RI mendukung pemenuhan alutsista TNI dalam rangka pencapaian MEF, di mana pada tahun 2020 yang telah memasuki MEF Tahap III (2019-2024).

“Kami berharap Pindad membuat inovasi tiada henti dalam pemenuhan alutsista. Keberpihakan pemerintah dalam penggunaan alutsista juga perlu didorong seta dukungan G to G (Government to Government) dengan negara lain dalam menjual produk dalam negeri, sehingga tidak hanya memenuhi nasional, tetapi juga internasional,” tutup. Usai pertemuan Tim Komisi I DPR RI meninjau alutsista hasil produksi PT. Pindad. ■ rmm/es



Tim Kunspek Komisi I DPR RI saat meninjau alutsista hasil produksi PT. Pindad (Persero). Foto: Ria/HR

Komisi II Dorong KPU Gunakan Sistem e-Rekap

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan akan memperkuat fungsi pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna mengantisipasi kecurangan di Pemilu, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar secara serentak pada tahun 2020 mendatang. Komisi II DPR RI juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan

sistem e-Rekap.

“Saat rapat kerja bersama KPU pusat kemarin, Komisi II telah mendesak agar KPU memberlakukan sistem e-Rekap. Dalam rapat kerja kemarin ada rencana dalam mengantisipasi kecurangan, kemudian penghitungan suara kita mau mendorong di berlakukannya sistem e-Rekap,” kata Ahmad Doli saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (15/11).

Namun Ahmad Doli menambahkan, sampai saat ini sistem tersebut belum dijalankan dan Komisi II DPR RI maupun KPU masih memilih cara dalam penanganan kecurangan pada Pilkada 2020 nanti. “Sekarang dalam tahap pengkajian, dan kami mencari sistem yang paling tepat untuk

”

SEKARANG DALAM TAHAP PENGKAJIAN, DAN KAMI MENCARI SISTEM YANG PALING TEPAT UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA KECURANGAN ITU

meminimalisir terjadinya kecurangan itu,” legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Dalam kesempatan ini, Komisi II DPR RI juga menyoroti daerah yang belum menandatangani perjanjian dana hibah. Pihaknya mendapat informasi, penandatanganan dana hibah di Kalsel telah selesai. “Informasi yang kita butuhkan soal penandatanganan hibah daerah yang di Jakarta sudah menjadi isu juga, ada beberapa daerah yang sampai sekarang belum ditandatangani. Tapi di sini semua sudah ditandatangani, ini modal penting,” tegasnya.

Legislator dapil Sumatera Utara III ini menambahkan, pihaknya mendapat informasi tingkat partisipasi masyarakat Kalsel dalam Pemilu mengalami kenaikan cukup besar, dan Pemprov Kalsel, KPU serta Bawaslu sangat siap dalam Pilkada 2020. “Saya kira dari tahun ke tahun ada kenaikan (partisipasi) sampai 81 persen ini harus dipertahankan. Secara keseluruhan persiapan yang kita lihat, bisa dinyatakan siap dan baik. Tinggal kita jaga saja,” tutupnya. ■ opi/sf

Ketua Komisi II DPR RI
Ahmad Doli Kurnia
Tanjung. Foto: Gerald/HR



Komisi II Pantau Persiapan Kepri Jelang Pilkada 2020



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menerima laporan Bawaslu Kepri di Batam. Foto: Jaka/HR

Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2020 akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak meliputi pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta lima kabupaten dan satu kotamadya. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo, persiapan dan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 masih menemui beberapa kendala.

“Dari hasil pantauan, saya kira ini membutuhkan perhatian kita bersama untuk segera diselesaikan. Diantaranya terkait letak geografis yang tidak mudah, karena Kepri ini terdiri dari banyak pulau. Untuk itu, perlu koordinasi antara penyelenggara, pemerintah dan aparat perihal distribusi logistik,” ujar Arif ini saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR

”

HARUS LEBIH DEMOKRATIS, TRANSPARAN, TANPA MONEY POLITIC DAN PARTISIPASI MENINGKAT

RI dengan penyelenggara Pilkada Kepri di Batam, Kepri, Kamis (14/11).

Ia menambahkan, soal partisipasi pemilih, diharapkan agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menginformasikan semua hal yang terkait dengan Pilkada. Sehingga bisa menggerakkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkan semangat mereka

untuk berpartisipasi dalam demokrasi dalam pilkada nanti.

“Saya kira ini menyangkut kualitas demokrasi yang harus kita tingkatkan, ini menjadi hal yang tidak kalah penting. Mengingat pada Pemilu 2014, Kota Batam memiliki partisipasi pemilih terendah. Sebagian masyarakat merasa tidak ada gunanya berpartisipasi, lebih baik mereka mengurus urusan pribadi, misalnya soal pekerjaan,” jelasnya.

Terkait pelayanan administrasi kependudukan, Arif mengatakan masih ditemukan kelangkaan blangko KTP-el dan penerbitan surat keterangan perekaman KTP-el yang masih dirasakan sulit oleh masyarakat. “Padahal menurut saya, itu menjadi syarat yang nanti dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk fenomena *money politic*, saya kira perlu didorong bagaimana bisa dicegah, karena ini merusak demokrasi dan penindakan hukumnya mesti jelas,” tegasnya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan, semua informasi data, perkembangan situasi dan kondisi, terkait dengan daerah-daerah yang akan menghadapi Pilkada 2020, akan menjadi bahasan di Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dalam rangka memperbaiki regulasi dan mengatasi hal yang sifatnya praktis di seluruh wilayah Indonesia.

Arif mengharapkan, Pilkada 2020 harus lebih demokratis, transparan, tanpa *money politic* dan partisipasi meningkat. Tentu saja kalau lebih demokratis, kecurangannya akan lebih sedikit. “Kalau menghindari kecurangan sama sekali tidak mungkin, tapi bagaimana kita meminimalisir kecurangan dari waktu ke waktu dan penyelenggaranya harus lebih efektif,” tutup Arif. ■ jk/es

Sulut Dinilai Siap Hadapi Pilkada Serentak 2020

Anggota Komisi II DPR RI Hugua menilai persiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut guna menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang sudah cukup baik. Kendati masih ada permasalahan teknis, namun ia yakin hal itu dapat segera diselesaikan.

“Secara umum sudah baik ya, hanya terkendala sedikit soal-soal teknis. Berkaitan dengan hal-hal teknis, saya kira, Provinsi Sulawesi Utara sudah siap. Begitupun KPU, KPUD, dan Bawaslu di Seluruh Indonesia, saya yakin juga semuanya sudah siap,” kata Hugua usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemprov Sulut dan mitra kerja terkait, di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis (14/11).

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan penting yang tak luput dari perhatian politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Salah satunya, terkait dengan perekaman data pemilih menggunakan KTP-Elektronik (KTP-el). Menurut Hugua, proses ini masih menemui kendala ketika Pemerintah Daerah mengeluarkan surat keterangan atau suket.

“Berkaitan dengan perekaman KTP Elektronik, di sinilah banyak ditemukan (permasalahan). Mereka mau tidak mau harus mengeluarkan suket atau surat keterangan, yang harus memiliki keseragaman agar tidak mudah dipalsukan,” tegas Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara periode 2006-2016 ini.

”

MEREKA MAU TIDAK MAU HARUS MENGELUARKAN SUKET ATAU SURAT KETERANGAN, YANG HARUS MEMILIKI KESERAGAMAN AGAR TIDAK MUDAH DIPALSUKAN

Anggota Komisi II DPR RI Hugua.
Foto: Guntur/HR

Pada hakikatnya, Komisi II DPR RI juga sudah memahami keterbatasan APBD Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Hugua dan pihaknya akan terus berusaha untuk meningkatkan pembiayaan dari APBN pada pelaksanaan Pilkada, sehingga tidak membebani APBD. Ini masukan yang baik dari pemangku kepentingan daerah yang akan diperperjuangkan pada tahun anggaran berikutnya.

“Anggaran ini gotong royong sebetulnya, gotong royong antara dana pusat dan dana dari daerah. Ke depannya kita akan tingkatkan pembiayaan APBN, jadi APBD pada tahun ajaran selanjutnya. Intinya semuanya menurut saya sudah baik, sudah hampir siap semuanya,” pungkas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara ini. ■ atw/sf



Komisi III Desak Aparat Berantas Tambang Ilegal Babel

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan

pentingnya penegakan hukum dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan kepastian berinvestasi, khususnya dengan adanya aktivitas pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Desmond meminta agar penegakan hukum tersebut jangan sampai mempersulit masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tambang timah.

Politisi F-Gerindra ini menyarankan adanya sosialisasi dari pihak penegak hukum dan pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur hubungan kemitraan antara perusahaan tambang dengan rakyat, agar rakyat yang bermitra dapat memahami dan melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa melanggar hukum.

Hal ini disampaikan Desmond usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Babel, Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, dan Direktur Utama PT. Timah di Mapolda Babel, Jumat (15/11). Menurutnya, jangan sampai penegakan hukum malah membuat masyarakat menjadi susah karena kehilangan mata pencahariannya dari aktivitas pertambangan.

"Nah bagaimana mengkomunikasikan, ya sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM tentang Kemitraan antara rakyat dengan perusahaan-perusahaan timah, dalam hal ini misalnya PT. Timah. Inikan belum terkomunikasi dengan baik dan yang jadi soal adalah wilayah-wilayah hutan lindung dan macam macam ini kan perlu ditegakkan," terang Desmond.

Lebih lanjut, Desmond meminta



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda Babel, Kejati Babel, dan Dirut PT. Timah. Foto: Tasya/HR

agar seluruh aparat penegak hukum, khususnya di Provinsi Babel untuk bekerja sama dalam melindungi PT. Timah yang merupakan salah satu aset negara. Ia meminta tindakan tegas dari aparat apabila ada oknum yang sudah bermitra dengan PT. Timah, namun menjual hasil tambangnya kepada pihak-pihak swasta.

"Ini harus ditegakkan hukumnya. Nah ini yang kami imbau kepada Kepolisian dan Kejaksaan agar hal-hal seperti ini harus ditegakkan agar kepastian berinvestasi PT. Timah dan kepastian berinvestasi swasta di daerah ini terlindungi dengan hukum. Inilah yang harus kita dialogkan," tegas Desmond.

Penegakan hukum itu tidak hanya berlaku untuk masyarakat saja. Jika diketahui ada pihak perusahaan menerima hasil tambang ilegal, Desmond juga mendesak adanya penegakan hukum terhadap perusahaan

dengan memastikan terlebih dahulu asal-usul dari tindakan ilegal tersebut. Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan negara tetangga yang tidak memiliki tambang timah namun bisa menjadi negara pengekspor timah. Menurutnya, penegakan hukum yang belum maksimal menjadi salah satu penyebab masih maraknya transaksi timah ilegal.

"Yang jadi soal hari ini, Thailand dan Malaysia sumber timahnya *enggak* jelas *kok* mereka bisa ekspor? Berarti penegakan hukum di wilayah sumber timahnya itu tidak beres. Berarti ada *backing* mem-*backing*-i dan ada saling ambil keuntungan atas penegakan hukum. Berarti kurangnya apa? Bisa *enggak* Thailand ekspor lagi atau Malaysia bisa *enggak* maksimal ekspornya padahal mereka tidak punya tambang, kan di situ kuncinya. Maka penegakan hukum sangat penting," tegas politisi dapil Banten II ini. ■ nap/sf

Komisi VI Apresiasi Kinerja PT. Petrokimia Gresik



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza meninjau pabrik produksi PT. PG. Foto: Tiara/HR

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengapresiasi kinerja PT. Petrokimia Gresik (PG) sebagai salah satu produsen pupuk terlengkap di Indonesia yang memproduksi berbagai macam pupuk dan bahan kimia untuk solusi agroindustri. Dirinya mengakui kinerja yang dilakukan PT. PG sudah luar biasa di tengah permintaan pasar yang tinggi.

“Jadi, jika pemerintah ingin mengembangkan PT. PG sebagai salah satu *pioneer* di perusahaan pupuk baik nasional maupun dunia, mungkin harus mengambil langkah-langkah aksi korporasi maupun aksi finansial untuk menyempurnakan lagi apa yang sudah berjalan di PT. PG saat ini,” jelas Faisol saat memimpin pertemuan dengan jajaran direksi PT. PG, Kementerian BUMN, dan PT. Pupuk Indonesia (Persero), di Pabrik Petrokimia, Gresik, Jawa Timur, Sabtu (16/11).

Politisi F-PKB ini menilai harus ada perbaikan di tengah persoalan yang dihadapi oleh PT. PG yakni terkait dengan terlambatnya pembayaran dana

subsidi penyaluran pupuk (Public Service Obligation/PSO) oleh Pemerintah. Sehingga dalam hal ini, PT. PG harus melakukan langkah-langkah keuangan agar tidak terjadi masalah *cash flow*.

“Untuk itu persoalan ini harus kita perbaiki, Komisi VI DPR tentu berharap agar PT. PG dapat meningkatkan laba bersih sehingga nantinya sumbangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kita bisa lebih tinggi. Di samping itu pula kita berharap adanya peningkatan kinerja ekspor yang dilakukan oleh PT. PG,” ungkap Faisol.

Terkait fenomena impor Pupuk Urea yang terus meningkat, yang dalam jangka panjang akan berdampak pada kinerja produksi urea dalam negeri, politisi dapil Jawa Timur II ini mengingatkan, agar PT PG melakukan penguatan pasar. Sehingga fenomena itu tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

“Aksi-aksi pasar yang bisa dilakukan oleh produk impor bukan tidak mungkin akan mempengaruhi kinerja PT. PG dan hal ini tidak bisa

dihindari. Memang sudah ada rencana-rencana jangka panjang yang sudah dilakukan oleh PT. PG, namun kita memerlukan *roadmap* yang lebih pasti sehingga nantinya kita tidak perlu khawatir kinerja dari PT PG ini akan terganggu oleh fenomena impor tersebut,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga (F-PG) yang turut mengapresiasi kinerja PT. PG, di tengah persoalan keterlambatan pembayaran dana subsidi penyaluran pupuk oleh Pemerintah. Pasalnya, PT PG masih bisa mengembalikan dividen sebesar Rp 1,7 triliun kepada negara di tahun 2018.

“Menurut saya ini patut diapresiasi. Untuk itu harus ada langkah-langkah konkret yang bisa diberikan oleh pemerintah agar, selain dividen yang disetorkan ke negara naik, kapasitas produksi juga naik, sehingga kebutuhan pangan kita tercukupi dan petani pun bisa meningkatkan kapasitas produksi masing-masing produk pertanian kita ,” pungkas politisi dapil Sumut II ini ■tra/es

Impor Gula Konsumsi Harus Dibatasi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengakui, produksi gula nasional untuk konsumsi hanya sebesar 2,6 juta ton dalam keadaan normal. Bahkan jika musim hujan dan banjir, hanya bisa menghasilkan 2,3 juta ton, bahkan kurang dari itu. Akibatnya, setiap tahunnya muncul defisit gula konsumsi mencapai ratusan ribu ton. Kekurangan kebutuhan gula konsumsi nasional dipenuhi dari impor. Namun Aria memastikan, pihaknya akan membatasi impor gula konsumsi guna menjaga produksi gula nasional.

Menurutnya, selisih impor gula untuk menutup defisit ini sebaiknya lebih dimanfaatkan ke kepentingan pabrik gula konsumsi dan memperhatikan produsen-produsen gula nasional. "Saya akan menjaga

betul defisit dari perihal tersebut, termasuk jangan sampai adanya *rembesan* dari gula industri ke gula konsumsi, jika tidak dijaga dan tidak ada *roadmap* gula pasti *ambayar*," tegas Aria saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Perkebunan Nusantara IX, Sragen, Jawa Tengah, Kamis (14/11).

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, jika tidak ada peta jalan atau *roadmap* dalam tata niaga gula nasional, termasuk tidak pembeda antara gula industri dan gula konsumsi, maka Indonesia tidak dapat meningkatkan produksi gula nasional. Untuk itu, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk membuat *roadmap timeline* selama 5 tahun, guna meningkatkan produksi pada 46 pabrik gula nasional sesuai dengan target, termasuk *on farm*-nya.

"*On farm* tahun ini jangan sampai merevitalisasi pabrik yang meningkatkan kapasitas produksi saja, tetapi tidak tersedia *on farm*-nya. *On farm* akan banyak bekerja sama antara pabrik gula dan Pemerintah Daerah setempat, termasuk sangat dimungkinkan diberikannya saham di BUMN gula. Ini saya kira hal yang solutif supaya Pemerintah Daerah menjaga lahan-lahan untuk tidak mengkonversi lahan tebu menjadi lahan yang lainnya, dan (petani) yang belum pun dapat tertarik untuk ditanami tebu," tutur Aria.

Terkait revitalisasi, Aria menekankan hal ini tidak bisa lepas dari target pondasi lima tahun untuk menuju swasembada pangan dalam konsep mencukupi kebutuhan pangan nasional dengan produksi pangan sendiri, termasuk gula. *Pilot project* revitalisasi pabrik gula dilakukan di Pabrik Gula (PG) Mojo, Sragen, dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 225 miliar, tanpa harus mengganti 100 persen mesinnya. Ada 46 pabrik gula di Indonesia yang dikelola PT. Perkebunan Nusantara dengan produksi gula nasional hampir 1,4 juta ton dari kebutuhan 3 juta ton dengan produksi pabrik gula swasta per satu juta.

"Untuk 5 tahun ke depan swasembada gula konsumsi ini, BUMN dengan 46 pabrik gula tersebut bisa kita revitalisasi secara bertahap, supaya target capaiannya bisa maksimal. Kalau petani *run demand* karena inefisiensinya di pabrik tetap 6 terus. Tapi begitu pabriknya kita revitalisasi, *run demand*-nya sudah bisa masuk ke 7, kemudian 8, seperti pabrik gula swasta. *Nah* target kami lewat PMN, ada yang *leverage asset* di PTPN III *holding*, untuk kita carikan pinjaman guna merevitalisasi dan saya jamin tidak akan rugi. *Toh* 260 juta orang (Indonesia) makan gula," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V ini. ■ cas/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Chasbi/HR

Legislator Berharap Kenaikan Iuran BPJS Disubsidi Negara



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena (pertama dari kiri). Foto: Azka/HR

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, pihaknya menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III per 1 Januari 2020. Ia berharap, jika memang Pemerintah tetap menaikkan iuran jaminan kesehatan, harus ada metode pembiayaan kelas III, salah satunya melalui subsidi khusus.

“Kami konsisten tidak setuju kenaikan iuran BPJS khusus untuk kelas III. Walaupun tetap naik, harus ada subsidi dari pemerintah kenaikannya, agar tidak membebani masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya usai pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX

DPR RI dengan Wakil Gubernur DI Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam X dan mitra kerja terkait di Kantor Gubernur DI Yogyakarta, Jumat (15/11).

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan bahwa banyak cara untuk pembiayaan BPJS Kesehatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Emanuel mencontohkan seperti adanya rencana menaikkan cukai rokok untuk menutup defisit anggaran, bisa juga dengan proses realokasi anggaran pembangunan infrastruktur.

“Untuk urusan rakyat Indonesia yang berjumlah seratusan juta ini, untuk mengalokasikan anggaran yang kurang lebih Rp 4 triliun bukanlah hal yang sulit buat Pemerintah. Badan Anggaran DPR RI, khususnya

”

JANGAN SAMPAI MASYARAKAT TERBEBANI LAGI DENGAN KENAIKAN IURAN INI. MUDAH MUDAHAN KITA BISA MENEMUKAN FORMULASI YANG TEPAT...

Komisi IX sudah siap mencari cara-cara terbaik untuk masyarakat,” pungkas legislator dapi Nusa Tenggara Timur II ini.

Mengenai rencana kenaikan BPJS ini, Komisi IX DPR RI terus bersama-sama dengan semua *stakeholder* terkait mencari formulasi yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat. “Jangan sampai masyarakat terbebani lagi dengan kenaikan iuran ini. Mudah mudahan kita bisa menemukan formulasi yang tepat sebelum 1 Januari, dan improvisasi-improvisasi yang bisa kami sama-sama temukan,” ungkap Emanuel.

Kendati kenaikan iuran ini merupakan domain Pemerintah, Emanuel berharap Presiden Joko Widodo bisa mempertimbangkan kembali kenaikan iuran BPJS tersebut. Dan Menteri Kesehatan Dr. Terawan juga sedang berjuang di internal Pemerintah agar tidak menaikkan iuran ini. “Saya kira kalau Pak Presiden turun langsung melihat, mudah-mudahan membuat beliau bisa meninjau ulang kenaikan iuran khusus kelas III. Saya kira masih ada waktu,” harapnya. ■ azk/sf

Komisi IX Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III

Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham secara tegas menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan untuk peserta Penerima Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia pun memberikan saran, jika nantinya harus ada kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan, bisa dinaikkan untuk peserta kelas I dan II, bukan pada peserta kelas III.

Hal itu ia ungkapkan usai memimpin Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan jajaran Dinas Kesehatan se-Provinsi Sulawesi Selatan, Asosiasi Rumah Sakit Daerah, Serikat Rakyat Miskin, di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Sulsel, Jumat (15/11).

“Saya yakin dan percaya kepada Bapak Menteri Kesehatan yang baru

akan membuat terobosan dan solusi yang baik untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, memperjuangkan kepentingan bersama untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya masyarakat tidak menginginkan kenaikan iuran tersebut. Saya harapkan ini ada jalan keluarnya,” tegas legislator Fraksi Partai Demokrat ini.

Aliyah berharap, berbagai aspirasi yang disampaikan pemangku kepentingan dan masyarakat Sulsel mengenai besaran iuran BPJS Kesehatan dapat dibahas pada rapat Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja terkait. “Harus ada pendataan ulang yang baik. Pendataan mana yang seharusnya diberikan kepada siapa yang membutuhkan. Tidak lagi yang kurang mampu diberatkan membayar kenaikan iuran BPJS,” pesan legislator dapil Sulsel I itu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Bachtiar Baso mengatakan, pihaknya berharap tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan, supaya masyarakat tidak terbebani. Namun ia tidak memungkiri, jika ini menjadi kebijakan nasional, maka Pemerintah Daerah harus ikut menjalankan.

“Khusus orang miskin (diharapkan) tidak ada kenaikan. Karena jika (iuran) dinaikkan, itu sangat fatal dan akan menjadi beban biaya kita di daerah. Saya berharap kepada DPR RI bisa memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat, karena kami pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan soal kenaikan, ataupun hal lainnya. Karena semua itu menjadi kebijakan pusat, dan untuk kami inginkan Komisi IX dapat menyerap aspirasi kami,” harapnya. ■ rmi/sf



Suasana pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dipimpin Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham dengan jajaran mitra kerja di Sulsel. Foto: Runi/HR

Penerimaan Pajak Harus Optimal Guna Minimalisir Utang

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga menyoroti kinerja Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Pasalnya Ditjen Pajak selalu tidak pernah mencapai target pajak yang ditetapkan. Eriko menilai kinerja dari Kemenkeu perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan jumlah pajak agar rasio utang di tahun mendatang bisa diminimalisir.

Kinerja Ditjen Pajak disoroti karena penerimaan pajak di hampir setiap tahunnya selalu gagal mencapai target yang ditetapkan, tetapi berbeda dengan Ditjen Bea Cukai yang di tiap tahunnya selalu melebihi target. Atas kondisi ini maka Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1, Jumat, (15/11), guna melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda penerimaan perpajakan.

“Ditjen Pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, tetapi Ditjen Bea Cukai selalu melampaui target pajak. Ini menjadi fokus dari teman-teman, mengapa ini bisa terjadi. Ini tinggal satu bulan lagi untuk mengakhiri tahun 2019,

tetapi sampai sekarang baru 80 persen yang tercapai. Kita mau mengetahui usaha yang dilakukan untuk mencapai semaksimal mungkin. Kalau pun tidak 100 persen, ya mendekati 100 persen,” dorong Eriko.

Eriko mengingatkan kepada jajaran Kemenkeu agar dapat secara maksimal meningkatkan jumlah penerimaan. Jika penerimaan tidak tercapai, maka Pemerintah terpaksa akan terus melakukan utang guna menutupi defisit anggaran yang selalu terjadi di tiap tahunnya. “Ini penting sekali pendapatan dari pajak cukai dan PNBPNBP bagi pemasukan. Karena jika tidak tercapai akan menyebabkan utang pada kegiatan perekonomian kita. Nah ini yang sebenarnya diinginkan oleh teman-teman untuk memfokuskan sejauh apa,” sambungnya.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini adalah keberadaan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga saat ini belum ada aturan turunannya atau Peraturan Pemerintah (PP), sehingga

menyebabkan UU PNBPNBP tidak bisa diimplementasikan hingga kini. Komisi XI DPR RI mendorong agar Pemerintah segera menetapkan PP atas UU PNBPNBP ini sebagai langkah cepat untuk meningkatkan penerimaan di sektor non pajak.

“Kami mendorong pemerintah segera menerbitkan PP atas UU PNBPNBP. Kita akan tanyakan terus kenapa hal ini bisa terjadi, dan apa yang bisa kami lakukan untuk mewujudkan hal ini. Jangan sampai hal ini tidak terjadi, sehingga UU ini belum bisa dilakukan karena PP-nya belum ada,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu. ■ hs/sf

”

...MENDORONG AGAR PEMERINTAH SEGERA MENETAPKAN PP ATAS UU PNBPNBP INI SEBAGAI LANGKAH CEPAT UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN DI SEKTOR NON PAJAK



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga. Foto: Hendra/HR

DPR Dorong Konsistensi Kanwil Kemenkeu Sulsel Tingkatkan Kepatuhan WP

Berdasarkan laporan tiga tahun terakhir sejak 2017 mengenai target penerimaan negara di wilayah Sulawesi Selatan yang masih belum mencapai target, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menegaskan bahwa DPR RI mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan untuk konsisten meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak (WP).

Ditemui usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) dengan para Kepala Kantor Wilayah Kemenkeu Sulawesi Selatan di Gedung Keuangan Negara, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (15/11), Amir mengatakan bahwa yang selalu menjadi kesulitan Kanwil Kemenkeu Sulsel dalam memenuhi target penerimaan negara adalah kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti makna wajib pajak.

“Tiga tahun terakhir kita lihat memang belum mencapai target. Untuk itu kita dorong terus Kanwil ini, sosialisasi kemudian membentuk kesadaran masyarakat agar berpikir positif mengenai makna wajib pajak. Tiap tahun memang meningkat tapi belum bisa memenuhi target. Saya kira ini bagian evaluasi kita agar tahun selanjutnya membaik,” tutur politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Amir juga mengakui rendahnya *tax ratio* menjadi alasan dari kegagalan tiga tahun ini. Ia mengelak ketika dikonfirmasi terkait masalah internal seperti kualitas dan integritas sumber daya manusia (SDM) di Kanwil yang



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara. Foto: Angga/HR

masih kurang. Politisi dapil Sulsel ini hanya meminta Ditjen Pajak untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menjemput bola untuk bisa memperbaiki permasalahan tersebut.

“Persoalan yang kita anggap masalah di SDM ini karena terkait dengan rasio antara petugas pajak dengan wajib pajaknya, bukan secara personal. SDM kalau kita lihat sama sekali tak ada masalah. Mereka terus berusaha meningkatkan kesadaran wajib pajak

dengan membuat sistem seperti sistem pembayaran *online* yang mengurangi sentuhan langsung antara petugas dengan wajib pajaknya,” imbuh Amir.

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Makassar kali ini, Amir didampingi beberapa anggota lainnya seperti Dolfie O. F. P (PDI-Perjuangan), I. G. A Rai Wijaya (PDI-Perjuangan), Agun Gunandjar Sudarsa (F-Golkar), Elnino M. Husein Mohi (F-Gerindra), Hasbi Anshory (F-NasDem), dan Anis Byarwati (F-PKS). ■ er/es

Target PNBPN Sumut Dipertanyakan

Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sebetulnya cukup tinggi. Namun, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) setempat malah menarget sangat kecil raihan PNBPN-nya. Tak heran dalam tiga tahun terakhir, capaian PNBPN Sumut terus menurun. Penyusunan target PNBPN yang setiap tahun diturunkan pun dipertanyakan.

“PNBP yang ada sedikit aneh. Dari dipa revisinya semakin hari semakin turun. Sementara potensinya lebih dari dipa revisinya sendiri,” tutur Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan kepada Parlementaria, usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan DJA Kanwil Sumut, di

Kualanamu, Jumat (15/11).

Dari data yang dirilis Kanwil DJA Sumut terlihat, pada 2017 capaian PNBPN Rp 1,174 triliun. Lalu pada 2018 targetnya diturunkan seperti tertulis dalam dipa revisinya sebesar Rp 364 miliar. Dan realisasinya pada 2018 sebesar Rp 1,099 triliun. Ironisnya lagi, capaian PNBPN 2018 itu ternyata masih diturunkan lagi menjadi Rp 315 miliar dan terealisasi Rp 806 miliar.

Menurut legislator F-Gerindra itu, dari potret capaian tersebut sebetulnya potensi PNBPN Sumut sangat tinggi. Ini jadi tanda tanya besar, mengapa Kanwil DJA setempat menurunkan targetnya setiap tahun. “Saya pikir khusus PNBPN nampaknya perlu sinergi antara kebijakan pusat



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.
Foto: Husen/HR

dengan daerah dan menyesuaikan diri dengan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN yang sudah diundangkan sejak 23 Agustus 2018. Kenapa potensinya besar tetapi DIPA revisinya dibuat kecil begitu,” ujar politisi dapil Jabar IV ini. ■mh/sf

Iuran BPJS Naik, Diprediksi Banyak Peserta Turun Kelas

Komisi IX DPR RI mengapresiasi Provinsi Bali yang mempunyai tingkat partisipasi dan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan rata-rata di atas 95 persen. Namun diprediksi ada dampak dengan adanya rencana kenaikan iuran per 1 Januari 2020 sesuai isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019. Salah satu prediksi yang muncul, akan banyak peserta turun kelas, khususnya dari peserta mandiri.

“Baru prediksi kalau nanti ada kenaikan, pasti akan turun banyak ke kelas III, sehingga rumah sakit juga perlu menyiapkan atau menata diri untuk menyesuaikan layanan kepada masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (15/11).

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, rumah sakit perlu memperbanyak tempat tidur untuk kelas III. Utamanya dalam menyikapi pemberlakuan

kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Meskipun secara nyata belum mengetahui apa yang nanti akan menjadi kekurangan ataupun masalah saat iuran naik.

“Hasil kunjungan kerja ini akan kita bawa ke komisi, kemudian kita akan lakukan rapat kerja dengan kementerian dan stakeholder terkait. Kesimpulannya nanti akan dipakai sebagai dasar melakukan perbaikan ke depan,” imbuh legislator dapil Jawa Timur VI itu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya memaparkan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan, memang paling memberatkan. Terlebih Provinsi Bali sudah hampir mencapai Universal Health Coverage (UHC), yakni di atas 95 persen. Lebih lanjut dirinya menjelaskan Pemerintah Provinsi Bali harus mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 297 miliar akibat kenaikan iuran BPJS, dari yang sebelumnya hanya Rp 170 miliar.

Sementara jika dihitung dengan

seluruh kabupaten/kota yang ada, kenaikannya hampir Rp 700 miliar, dari yang sekarang Rp 495 miliar. Suarjaya mengatakan, kenaikan itu bisa terjadi karena jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di kabupaten/kota mencapai lebih dari 1,5 juta. Kendati kenaikan iuran ini sangat memberatkan pihaknya sebagai pelaksana mengaku kembali pada kebijakan kepala daerah dan kepastian kebijakan dari pemerintah pusat. ■ran/sf



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu (kanan).
Foto: Riska/HR

Perkuat Peran, BAKN Serap Masukan Akademisi UGM



Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Soepratikno. Foto: Puntho/HR

Penguatan peran Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan didukung akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebab, menurut akademisi UGM, jika selama ini rekomendasi BAKN tidak memicu tindakan dan tidak ditindaklanjuti dengan koreksi, maka rekomendasi itu hanya tinggal sekedar rekomendasi tertulis saja tanpa memiliki implikasi yang berarti.

“Kalau rekomendasi BAKN itu tidak memicu tindakan dan tidak ditindaklanjuti dengan koreksi, maka rekomendasi itu hanya sekedar rekomendasinya tertulis saja. Jadi, jangan sampai nantinya BAKN hanya macan kertas,” kata Wakil Ketua BAKN DPR RI Hendrawan Soepratikno, usai mengikuti Kunjungan Kerja BAKN

DPR RI dalam rangka audiensi dengan Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), di Yogyakarta, Rabu (13/11).

Hendrawan menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, akademisi UGM memberi saran dan masukan untuk adanya penguatan kelembagaan di BAKN yang bertujuan agar ke depannya fungsi pengawasan yang dijalankan BAKN dapat bisa dilakukan lebih efektif. Mengingat, selama ini BAKN bekerja di tengah peran lembaga lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), AKD DPR RI, dan *supporting system* seperti Badan Keahlian DPR RI.

“Nah, tinggal ke depan bagaimana hal ini dibuat sinergi sedemikian rupa, agar BAKN bisa menjalankan fungsinya,” tutur Hendrawan. Di sisi lain, akademisi UGM juga meminta kepada BAKN agar Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dapat direvisi. Tujuannya, ungkap Hendrawan, agar pemeriksaan yang

”

NAH, TINGGAL KE DEPAN BAGAIMANA HAL INI DIBUAT SINERGI SEDEMUKIAN RUPA, AGAR BAKN BISA MENJALANKAN FUNGSINYA

dilakukan BPK bisa memiliki implikasi yang lebih efektif.

“Pada pertemuan ini, para tokoh akademisi UGM memberikan penjelasan secara keilmuan perbedaan antara pengertian audit dan pemeriksaan. Audit itu lebih luas dari pemeriksaan. Itu sebabnya mereka mengenalkan istilah baru pengauditan, dan bukan pemeriksaan,” papar legislator PDI-Perjuangan itu.

Selain itu, akademisi UGM juga menyarankan kata “akuntabilitas” yang disandang BAKN diganti menjadi “pertanggungjawaban”. Hal itu dimaksudkan untuk membedakan dengan tanggungjawab yang dibahasakan sebagai pertanggungjawaban. “Jadi, akuntabilitas itu pertanggungjawaban, sedangkan tanggungjawab itu pertanggungjawaban. Itu kita diskusikan cukup panjang demi arah apa yang akan dilakukan perbaikan BAKN DPR RI ke depan,” pungkash Hendrawan.

Turut hadir dalam pertemuan ini, sejumlah Anggota BAKN DPR RI dan *civitas academica* UGM, diantaranya Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Prof. Dr. Suwardjono, dan Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Prof. Dr. Wahyu Kumorotomo. ■ pun/sf

Masyarakat Diharap Beri Masukan Penyusunan Prolegnas

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja guna menjangkau aspirasi masyarakat, terutama di Sumatera Selatan (Sumsel) terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menyampaikan tujuan kegiatan jemput bola tersebut agar masyarakat terlibat aktif dan sejak awal memberikan masukan pada proses pembentukan Undang-Undang (UU). Dengan harapan, setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditetapkan menjadi UU senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

“Aspirasi ini kami perlukan untuk merancang urutan maupun daftar-daftar Prolegnas agar sesuai aspirasi

masyarakat, karena kita membuat UU harus berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat,” ujar politisi Fraksi PPP di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Kamis (14/11).

Tim Kunjungan Kerja Baleg diterima Asisten I Ahmad Nadjib beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sejumlah kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan di Sumsel turut hadir pada pertemuan tersebut, diantaranya Anggota DPRD, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, LSM, tokoh masyarakat, dan akademisi.

Dipaparkan Baidowi, dalam penyusunan Prolegnas, Baleg DPR RI terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung, atau melalui surat.

“Karena hukum itu diterapkan untuk masyarakat, jadi harus benar-benar

sesuai aspirasi yang disampaikan,” kata dia seraya berharap masukan yang diterima bersifat konstruktif agar memberikan penguatan bagi penyusunan Prolegnas ke depan.

“Misalnya, ada masukan mengenai RUU Lembaga Pemasyarakatan kaitannya dengan tindak pidana dijelaskan secara detail dan bahasanya bisa dicerna langsung masyarakat, contohnya pencurian dengan pemberatan itu dengan perampokan, pembegalan, pencopetan, orang langsung paham. Nah, ini kan tidak ada di KUHP, karena itu ini menjadi salah satu aspirasi dari perwakilan Pengadilan Tinggi,” jelas Baidowi.

Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu menambahkan, dalam penyusunan RUU, Baleg DPR RI akan mengedepankan aspek kualitas, sehingga RUU yang dihasilkan dapat terimplementasi dengan baik. “Kita memang menghindari kuantitas, karena kalau terlalu mengedepankan aspek kuantitas dikhawatirkan akan tumpang tindih, ada UU yang sudah diatur, sementara masih ada UU lain yang diusulkan, kan tidak bagus juga kalau seperti itu,” terangnya.

Apalagi, lanjut Baidowi, Pemerintah saat ini sedang menggagas *Omnibus law*. “Yakni menggabungkan beberapa UU yang memiliki ketentuan yang mirip, punya irisan yang sama ataupun bertentangan untuk disatukan menjadi satu kesatuan UU,” imbuh Baidowi sembari menambahkan Baleg akan aktif jemput bola untuk menjangkau masukan hingga pada Desember mendatang, sebelum masa sidang ini berakhir. ■ ann/es



Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi. Foto: Anne/HR



Prolegnas 2020 Akan Prioritaskan UU IKN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Tengah sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo Agustus lalu, perlu ditindaklanjuti dengan menyiapkan regulasi atau

Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Agar tidak berlarut, UU IKN direncanakan akan masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Demikian diungkapkan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz usai memimpin pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kamis (14/11). Ia mengatakan kunjungan ini dalam rangka menyerap aspirasi dalam penyusunan Prolegnas tahun 2020 dan Prolegnas jangka panjang periode 2019-2024.

“Tujuan kita untuk kunjungan ini adalah pertama di samping Kaltim sebagai calon Ibu Kota Negara yang tentu pasti akan banyak membutuhkan

perubahan-perubahan UU atau regulasi dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu untuk Prioritas 2020 itu diantaranya UU IKN ini,” kata Eem, sapaan akrabnya.

Politisi Fraksi PKB ini menambahkan, UU IKN ini menjadi penting untuk segera dibahas, karena akan berkaitan dengan isu lainnya seperti tata ruang, pengelolaan pertanahan juga kehutanan di Ibu



TUJUAN KITA UNTUK KUNJUNGAN INI ADALAH PERTAMA DI SAMPING KALTIM SEBAGAI CALON IBU KOTA NEGARA YANG TENTU PASTI AKAN BANYAK MEMBUTUHKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN UU ATAU REGULASI DAN SEBAGAINYA

Kota yang baru nanti.

Politisi yang juga Anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan terkait infrastruktur pembangunan dan konektivitas persiapan Ibu Kota Negara, akan segera dibicarakan lebih lanjut. “Kunjungan hari ini merupakan tugas konstitusional dalam menjalankan fungsi legislasi. Sedangkan *budgeting* (Anggaran), kita belum mengganggu (pembangunan Infrastruktur), karena memang UU IKN ini belum ada,” ungkapnya.

Turut hadir pada kunjungan kerja spesifik Baleg DPR RI ke Kalimantan Timur ini, yakni Syafruddin H Maming (F-PDI Perjuangan), Rudy Mas’ud (F-Golkar), Santoso (F-Demokrat) serta Gusparda Gaus (F-PAN). ■ es

Anggota Baleg DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.
Foto: Erman/HR



Baleg Serap Aspirasi Prolegnas dan Prolegnas Prioritas

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menyambut baik berbagai aspirasi atau masukan terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Prolegnas Prioritas dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami dari Baleg sengaja datang ke NTT bertemu dengan Pemprov, tidak lain untuk mendengar dan menampung masukan terkait berbagai peraturan yang dibutuhkan untuk Prolegnas dan Prolegnas Prioritas. Terlebih lagi saat ini pemerintah sedang merencanakan *omnibus law*,” ujar Willy usai pertemuan Tim Kunkerj Baleg dengan Wakil Gubernur NTT Josef Nae soi di Kantor Gubernur NTT, Kupang, Senin (18/11).

Ada beberapa masukan dari Pemprov NTT, diantaranya tentang keberadaan tanah ulayat, dan usulan pengembalian wewenang pengelolaan hutan ke Pemerintah Kabupaten. Namun lanjut Willy, hal yang paling mencuat dan *urgent* bagi Pemprov NTT adalah terkait dengan keberadaan tanah ulayat.

Karena tidak sedikit investasi yang ingin masuk ke NTT terbentur adanya regulasi tentang tanah ulayat dari masyarakat adat. “Padahal salah satu tujuan dari rencana *omnibus law* itu untuk meningkatkan investasi yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat sekitar,” ungkap Willy.

Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat

”

PADAHAL SALAH SATU TUJUAN DARI RENCANA OMNIBUS LAW ITU UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI YANG PADA AKHIRNYA MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN YANG BESAR BAGI MASYARAKAT SEKITAR

(NasDem) ini menyambut baik dan menampung aspirasi yang disampaikan pihak Pemprov NTT. Substansi tentang tanah ulayat akan dipetakan atau diklasterkan serta diharmonisasi di Baleg DPR RI dengan berbagai undang-undang dan peraturan lain yang ada.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTT Josef Nae soi menjelaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan akan dimasukkan dalam klaster perundangundangan yang mana, tentang tanah ulayat tersebut. Yang terpenting adalah substansi tentang tanah ulayat itu memiliki payung hukum yang kuat yang akan menggairahkan iklim investasi di NTT, sehingga pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat NTT. ■ *ayu/es*



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya.
Foto: Ayu/HR

Baleg Terima Aspirasi Regulasi Investasi di Makassar



Tim Kunker Baleg DPR RI bertukar cenderamata dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Foto: Oji/HR

Regulasi investasi menjadi salah satu bahasan yang menarik saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (sulsel) dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akademisi dan dihadiri pula perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Ruang Rapat Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (18/11).

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan adanya aspirasi dari pemangku kepentingan di Sulsel tentang perlunya dukungan regulasi untuk mempermudah proses investasi di daerah. "Regulasi investasi ini perlu segera direalisasikan untuk mendukung program kerja pemerintah dalam mendorong masuknya investasi di daerah, terutama di Makassar agar meningkatkan perekonomian daerahnya," ungkap Baidowi.

Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan

Kunker Baleg ke Sulsel ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020 juga menyebarkan capaian Prolegnas 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

"Karena yang diundang juga para pakar dari kampus yang ada di Sulsel, kami mengharapkan masukan terkait *omnibus law*, yaitu pembentukan undang-undang baru yang mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus untuk menghindari tumpah tindih pengaturan. Kami ingin mengetahui bagaimana pendapat masyarakat dan undang-undang terkait hal apa saja yang dianggap perlu dilakukan *omnibus law*," tandasnya.

Baleg DPR RI secara terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR RI, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung

melalui surat, dengan harapan pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, mengapresiasi Tim Kunspek Baleg DPR RI yang memilih Makassar sebagai salah satu kota untuk menyerap aspirasi terkait penyusunan UU. "Kami merasa terhormat atas kedatangan Tim Baleg DPR RI ke Makassar untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait masukan-masukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional," jelas Abdul Hayat Gani.

Gani mengharapkan semua komponen masyarakat yang hadir menyuarkan aspirasinya ke Baleg DPR RI untuk dibawa ke tingkat pusat dalam penyusunan UU. "Kami juga berharap Baleg DPR RI mengakomodir masukan dari pemerintah daerah terkait pentingnya regulasi yang memudahkan investasi," pungkas Gani. ■ oji/es

Mahasiswa Sebagai Masyarakat Intelektual Miliki Ragam Ide dan Gagasan

Mahasiswa merupakan sebuah miniatur masyarakat intelektual yang memiliki corak keberagaman pemikiran, gagasan dan ide-ide yang penuh dengan kreatifitas dalam rangka mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat membacakan makalah Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Kemananan (Korpolkam) Azis Syamsuddin dalam acara Parlemen Kampus 2019 di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Rabu (13/11).

“Sungguh menarik memang jika kita kembali memperbincangkan persoalan kampus dan dinamikanya yang sangat dinamis. Kampus merupakan tempat pengembangan diri yang memberikan perubahan pikiran, sikap, dan pencerahan, tempat mahasiswa lahir menjadi kaum pemikir bebas yang tercerah,” kutip politisi PKS itu.

Dengan sifat keintelektual dan idealismenya, sambungnya, mahasiswa lahir dan tumbuh menjadi entitas (model) yang memiliki paradigma ilmiah dalam memandang persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan. Ciri dan gaya mahasiswa terletak pada ide atau gagasan yang luhur dalam menawarkan solusi atas persoalan-persoalan yang ada.

“Pijakan ini menjadi sangat relevan dengan nuansa kampus yang mengutamakan ilmu dalam memahami substansi dan pokok persoalan apapun. Dengan kata lain, kampus merupakan laboratorium

besar tempat melahirkan beragam ide, pemikiran, pengembangan wawasan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk peranan sosial individu mahasiswa tersebut dalam kehidupan kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian masyarakat,” ucapnya.

Mahasiswa yang berada pada usia transisi, yakni berada diantara usia anak dan usia dewasa dimana terjadi proses perkembangan dan perubahan sifat-sifat tradisionalnya, menjadi bentuk dan fase yang jauh lebih matang. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan kehadiran generasi muda bukan semata-mata gejala demografis, tetapi juga gejala sosiologis dan historis yang memandang generasi muda tidak hanya mengisi sebuah episode generasi baru dalam komunitas masyarakat, tetapi subjek potensial bagi perubahan komunitas itu sendiri .

Dalam sejarah peradaban bangsa, lanjutnya, mahasiswa merupakan

aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai *agent of change* (agen perubahan). Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada mahasiswa yang memeloporinya.

“Mahasiswa juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat karena mahasiswa dipandang memiliki kemurnian idealisme; keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai dan gagasan baru; semangat pengabdian; spontanitas; Inovasi dan kreatifitasnya; keinginan untuk segera mewujudkan gagasan baru; keteguhan janji dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri; dan masih langkanya pengalaman yang merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan,” tutur Nasir. ■ dep/es



Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat diskusi pada Parlemen Kampus 2019 di Universitas Syiah Kuala, Aceh. Foto: Surya/HR



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus bersama Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI berfoto dengan Kakanwil Kemenag Sulsel beserta jajaran. Foto: Sofyan/HR

Peminat dan Kuota Haji Tak Sebanding

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI mendapat informasi dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa masa tunggu Haji di Sulsel ada yang mencapai puluhan tahun. Masa tunggu Haji yang terlama ada di Kabupaten Bantaeng, yang mencapai 42 tahun. Disusul Kabupaten Sidrap, dimana masa tunggu berkisar 41 tahun. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai, ini merupakan permasalahan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dimana peminat dan kuota Haji tidak sebanding.

“Memang kita pahami bersama, masa tunggu Haji ini menjadi masalah di seluruh Indonesia. Memang yang menginginkan naik Haji dan kuotanya tidak sebanding. Ini perjuangan kita,

bagaimana kemudian bisa kita buat matriksnya, kita usahakan percepat masa tunggu, dan persiapkan calon jemaah Haji,” kata Ihsan saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kakanwil Kemenag Sulsel beserta Kepala Kemenag tingkat kabupaten/kota se-Sulsel, di Asrama Haji Makassar, Sulsel, Jumat (15/11).

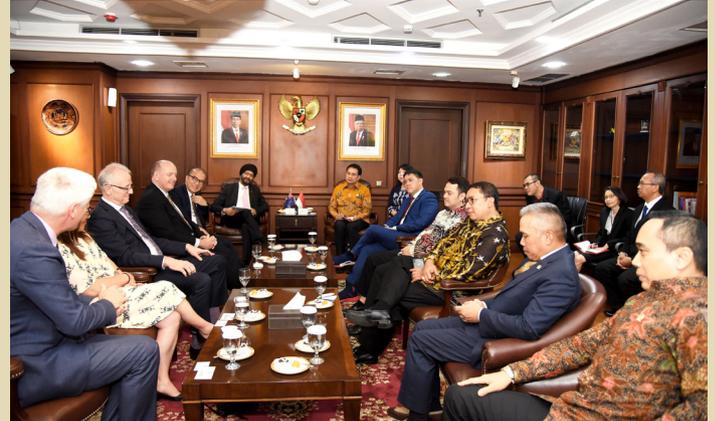
Politisi PDI-Perjuangan itu mengakui, prioritas keberangkatan itu tidak bisa dilihat kasus per kasus di setiap kabupaten atau kota. Ia pun sepakat dengan langkah Pemerintah Indonesia yang mendahulukan calon jemaah Haji berusia lansia. Sehingga, masa tunggu menjadi tidak terlalu lama.

Ihsan memastikan, pihaknya bersama Pemerintah Indonesia kembali akan meminta tambahan kuota Haji kepada Kerajaan Arab Saudi. Sehingga

harapannya masa tunggu calon jemaah Haji Indonesia berkurang. “Saya rasa itu tugas kita semua (untuk meminta tambahan kuota Haji). Tidak hanya Komisi VIII, Kemenag, tapi seluruh jajaran di Indonesia. Tapi kita mesti siapkan juga calon jemaah Hajinya, jangan sampai kita mendapat tambahan kuota, malah belum siap secara finansial, jasmani, rohani dan lainnya,” pesan legislator dapil Jambi itu.

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad (F-Demokrat) turut menyoroti masa tunggu jemaah Haji Indonesia yang mencapai puluhan tahun di Sulsel. Menurutnya, perlu ada perbaikan pada sistem kuota Haji. Ia menyarankan perlu ada identifikasi bagi daerah-daerah yang masa tunggu Hajinya tinggi.

“Dengan penambahan kuota Haji ini, kita harapkan dapat mengurangi lamanya masa tunggu. Mungkin juga ada kebijakan untuk memprioritaskan calon jemaah Haji yang lansia di atas 60 tahun. Sehingga mereka tidak bergantung pada waktu daftar, tapi dilihat nama dan umurnya, sehingga dapat diprioritaskan,” harap legislator dapil Riau I itu. ■ sf



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menerima kunjungan Parlemen Selandia Baru didampingi Dubes RI untuk Selandia Baru dan Anggota Dewan lainnya di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11). Foto: Arief/HR



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Chang-Beom Kim di Ruang Delegasi DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11). Foto: Arief/HR



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menerima audiensi mahasiswa dan akademisi Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah di Ruang Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11). Foto: Kresno/HR

